



Industrialisasi Sebagai Kekuatan Politik Negara

¹ Kustiawan , ² Syaihidina Hefir , ³ Zhahara Dwi Amanda , ⁴ Ajeng Aprianingsih , ⁵ Nana Amelia Serikat ,

^{1,2,3,4,5} Universitas Maritim Raja Ali Haji

¹ Email: kustiawan@umrah.ac.id , ² Email: syaihidinahefir@gmail.com , ³ Email: zhaharamanda@gmail.com , ⁴ Email: ajengaprianingsih@gmail.com , ⁵ Email: nanaameliasefti@gmail.com

Abstract : *Industrialization has helped the economic growth and progress of many countries, but it is still understood about its effects on government, power structures, and social relations. The study investigates the impact of industrialization on these three components, with particular emphasis on Indonesia. Government has changed significantly as a result of industrialization, which has played an important role in driving industrial growth. To attract foreign investment, improve infrastructure, and improve the business environment, governments have implemented several policies, but there are concerns about their ability to oversee industry and protect the interests of local communities. In addition, the power structure has undergone significant shifts, with the emergence of new social classes and the consolidation of power among certain classes. The industrial sector has also created new opportunities for social mobility, but has also exacerbated economic and social disparities. To solve this problem, this study suggests that the distribution of wealth and power must be fairer. Industrialization, along with increased urbanization and urban growth, has had a significant impact on social relations. The study investigates how industrialization has affected social relationships, including its impact on family structures, community networks, and social identities. So, Indonesian government, power structure, and social relations are heavily influenced by industrialization. Although it has produced significant economic gains, it has also created new problems and differences. This research suggests that a deeper understanding of the impact of industrialization is vital, as are the policies needed to address the social and economic impacts of industrialisation.*

Keywords: *industrialization, government, power structure, social relations, Indonesia.*

Abstarck : Industriisasi telah membantu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan banyak negara, tetapi masih kurang dipahami tentang efeknya terhadap pemerintahan, struktur kekuasaan, dan hubungan sosial. Studi ini menyelidiki dampak industrialisasi terhadap tiga komponen ini, dengan penekanan khusus pada Indonesia. Pemerintah telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari industrialisasi, yang telah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri. Untuk menarik investasi asing, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan lingkungan usaha, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan, tetapi ada kekhawatiran tentang kemampuan mereka untuk mengawasi industri dan melindungi kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, struktur kekuasaan telah mengalami pergeseran yang signifikan, dengan munculnya kelas sosial baru dan konsolidasi kekuasaan di antara kelas-kelas tertentu. Sektor industri juga telah menciptakan kesempatan baru untuk mobilitas sosial, tetapi juga telah memperburuk disparitas ekonomi dan sosial. Untuk menyelesaikan masalah ini, penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dan kekuasaan harus lebih adil. Industrialisasi, bersama dengan peningkatan urbanisasi dan pertumbuhan kota, telah memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan sosial. Studi ini menyelidiki bagaimana industrialisasi telah mempengaruhi hubungan sosial, termasuk dampaknya terhadap struktur keluarga, jaringan komunitas, dan identitas sosial. Jadi, pemerintahan Indonesia, struktur kekuasaan, dan hubungan sosial sangat dipengaruhi oleh industrialisasi. Meskipun telah menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan, juga telah menimbulkan masalah dan perbedaan baru. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak industrialisasi sangat penting, serta kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari industrialisasi.

Kata kunci: industrialisasi, pemerintahan, struktur kekuasaan, hubungan sosial, Indonesia.

PENDAHULUAN

Industrialisasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi banyak negara. Tetapi itu berdampak pada ekonomi dan politik secara keseluruhan. Industri berkembang bersamaan dengan munculnya peluang ekonomi baru, yang menghasilkan permintaan sosial dan politik yang meningkat (Rizky, Lucitania & Chusnul, 2020). Perubahan ini dapat menyebabkan

perubahan politik ketika kelas menengah berusaha mempertahankan pengaruhnya dan melindungi kepentingannya. Perkembangan ini sering dikaitkan dengan peningkatan kapitalisme dan pertumbuhan kelas menengah. Industrialisasi telah berperan penting dalam membangun partai politik baru atau memperkuat yang sudah ada. Industrialisasi dapat berdampak besar pada bagaimana kekuasaan didistribusikan dalam masyarakat. Saat industri berkembang dan aktor ekonomi baru muncul, struktur kekuasaan lama dapat berubah dan struktur baru muncul. Industrialisasi dapat digunakan sebagai alat untuk perubahan sosial dan politik ketika aktor ekonomi baru mencoba mencabar struktur kekuasaan yang ada dan mempromosikan kepentingannya, serta antara sektor swasta dan pemerintah (Susanto, 2016).

Selain itu, industrialisasi dapat memengaruhi pemerintahan dan peran negara. Ini dapat mencakup penciptaan lembaga regulasi baru, pembuatan kebijakan ekonomi baru, atau perbaikan lembaga yang ada (Zulkarnaen, 2018). Industrialisasi kadang-kadang telah menyebabkan munculnya jenis pemerintahan baru, seperti kemitraan antara pemerintah dan swasta atau zona ekonomi baru. Bagaimana industrialisasi mempengaruhi politik suatu negara sangat beragam dan kompleks. Tujuan jurnal ini adalah untuk menggali lebih dalam masalah ini dengan melihat bagaimana industrialisasi mempengaruhi dinamika politik suatu negara dan dampak industrialisasi terhadap pemerintahan, struktur kekuasaan, dan hubungan sosial. Industrialisasi dapat membawa keuntungan ekonomi, tetapi juga dapat mengubah distribusi kekuasaan, menciptakan permintaan politik dan sosial baru, dan mengubah keseimbangan kekuasaan antara berbagai kelompok sosial.

PEMBAHASAN

Industrialisasi Sebagai Kekuatan Politik Negara

Industrialisasi adalah proses transformasi ekonomi yang signifikan yang memengaruhi struktur dan dinamika politik suatu negara. Dengan demikian, industrialisasi dapat dilihat sebagai strategi politik yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi dan meningkatkan kemampuan negara untuk menghadapi tantangan global. Dalam teori, industrialisasi dapat dipahami sebagai proses yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor ini termasuk kondisi dan struktur awal ekonomi, pasar dalam negeri yang besar, karakteristik industrialisasi, keberadaan sumber daya alam, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Industrialisasi cenderung berjalan lebih cepat dan efisien di negara-negara dengan industri besar dan pasar dalam negeri yang luas. Industrialisasi juga dapat dilihat sebagai strategi politik yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan negara untuk menghadapi tantangan global. Dalam hal ini, industrialisasi dapat dilihat sebagai

cara untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dan meningkatkan kemampuan negara untuk menghadapi persaingan global.

Industrialisasi dapat dianggap sebagai bagian dari sistem politik yang lebih luas, di mana ia meningkatkan kemampuan negara untuk menghadapi tantangan politik dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Dalam konteks ini, industrialisasi juga dapat dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan negara untuk menghadapi persaingan global dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya.

Pengaruh Industrialisasi terhadap Kekuatan Politik Suatu Negara

Dengan sektor industri pengolahan sebagai pemimpin, industrialisasi dapat meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi, yang dapat meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi tantangan global, industrialisasi memerlukan kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien. Kebijakan pemerintah yang protektif dapat membantu negara dalam menghadapi persaingan global, tetapi kebijakan yang terlalu protektif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung industrialisasi, negara harus memainkan peran aktif dalam mengelola perekonomian dan memiliki kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup rakyatnya dan menghadapi tantangan global. Selain itu, negara harus memiliki sumber daya alam yang cukup untuk mendukung industrialisasi. Industrialisasi memerlukan masyarakat yang memiliki kemampuan teknologi dan inovasi yang tinggi, serta pendidikan dan pelatihan yang baik untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi tantangan global. Masyarakat juga harus memiliki mentalitas pekerja yang kuat dan mental pengusaha yang baik untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi persaingan global. Industrialisasi dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat dengan meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi tantangan global dan persaingan global. Industrialisasi juga dapat meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, Industrialisasi berdampak pada kekuatan politik suatu negara dalam beberapa cara, termasuk struktur ekonomi, kebijakan pemerintah, peran negara, masyarakat, dan kualitas hidup rakyat. Industrialisasi juga memerlukan kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien, masyarakat yang kuat dalam teknologi dan inovasi, dan peran swasta yang aktif dalam mengelola perekonomian.

Peran Pemerintah Dalam Mendukung Industrialisasi Sebagai Kekuatan Politik

Sebagai kekuatan politik, peran pemerintah dalam mendukung industrialisasi sangat penting. Dalam penelitian (Diana et al., 2024) untuk meningkatkan kemampuan negara untuk menghadapi tantangan global dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya, pemerintah harus

memiliki kebijakan yang efisien dan efektif, infrastruktur yang baik, pendidikan dan pelatihan yang baik, intervensi yang tepat, dan bekerja sama dengan sektor swasta yang aktif. Kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien dapat membantu negara menghadapi tantangan global dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Kebijakan pemerintah yang protektif dapat membantu negara menghadapi persaingan global, tetapi kebijakan yang terlalu protektif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan pelatihan yang baik dapat membantu meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan kualitas hidup rakyat (Damayanthi, 2008). Infrastruktur yang baik juga dapat membantu meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi persaingan global dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Intervensi pemerintah yang tepat dapat meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Dampak Industrial Terhadap Pemerintahan

Pemerintahan dipengaruhi oleh industrialisasi. Industrialisasi pada tingkat nasional memungkinkan negara untuk mengoptimalkan sumber dayanya dan meningkatkan pendapatannya melalui ekspor produk manufaktur dan substitusi impor, yang memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan kesempatan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan negara (Zulkarnaen, 2018). Pemerintah juga harus mengawasi perusahaan yang tidak berizin untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Pada tingkat lokal, keberadaan industri dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Namun, keberadaan industri juga dapat menimbulkan masalah struktur dan efisiensi yang serius, seperti penurunan harga minyak global, yang memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan protektif dalam perdagangan dan industri. Industrialisasi juga dapat mempercepat pekerjaan pemerintahan dengan mengotomatisasi tugas seperti manajemen data dan inventaris.

Dampak Industrial Terhadap Struktur Kekuasaan

Industrialisasi mempengaruhi struktur kekuasaan, seperti yang ditunjukkan oleh peran pemerintah dalam mendorong partisipasi swasta dan mengawasi keberadaan bisnis. Pemerintah harus mengawasi bisnis yang tidak berizin untuk mengurangi dampak negatif mereka terhadap lingkungan (Selvia Tumengkol, 2012). Industrialisasi juga dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan mengotomatisasi tugas seperti manajemen data dan inventaris. Industrialisasi juga dapat membuat pemerintah lebih bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang lebih protektif, seperti bea masuk dan barrier non-tarif, untuk melindungi bisnis nasional (Alamsyah & Rahaju, 2022). Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur

industri dan memastikan bahwa keberadaan industri memberikan manfaat lingkungan dan masyarakat yang seimbang.

Dampak Industrial Terhadap Hubungan Sosial

Perubahan dalam cara interaksi sosial masyarakat menunjukkan dampak industrialisasi terhadap hubungan sosial. Studi telah menunjukkan bahwa industri memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan sosial di sekitar lokasi industri. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Elis, 2013) di Kampung Babakan Lapang Desa Solokanjeruk menunjukkan bahwa keberadaan industri telah berdampak pada urbanisasi dan pergeseran pola interaksi sosial yang lebih individualistis dan materialistis. Ini disebabkan oleh kemajuan ekonomi dan teknologi yang mempengaruhi cara hidup masyarakat, seperti meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, tetapi juga dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Industrialisasi juga dapat berdampak pada struktur sosial masyarakat, seperti perubahan pola interaksi sosial dan perubahan budaya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Rahayuningsih, 2017) di Kota Cilegon menunjukkan bahwa industri telah berdampak pada perubahan sosial masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan dan kualitas hidup masyarakat karena perubahan ekonomi dan teknologi yang mempengaruhi cara hidup masyarakat.

KESIMPULAN

Dampak industrialisasi terhadap pemerintahan, struktur kekuasaan, dan hubungan sosial memiliki implikasi yang signifikan. Pemerintahan harus mengawasi keberadaan perusahaan yang tidak berijin dan mengambil kebijakan protektif untuk melindungi kegiatan ekonomi nasional. Selain itu, industrialisasi juga dapat meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan dengan mengotomatisasi proses administratif. Dampak industrialisasi juga berdampak pada perubahan sosial masyarakat, seperti urbanisasi, perubahan pola interaksi sosial, dan perubahan budaya. Pemerintah harus memperhitungkan dampaknya pada masyarakat sekitar dan mengambil kebijakan yang seimbang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perkembangan kawasan industri harus dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada masyarakat sekitar dan lingkungan.

Oleh karena itu, ideologi industrialisasi memengaruhi kebijakan pemerintah, membentuk kebijakan industrialisme, proteksionisme, strategi ekspor, dan pengembangan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, M. F. P., & Rahaju, T. (2022). Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. *Publika*, 10(4), 1151–1162. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1151-1162>
- Damayanthi, V. R. (2008). Proses industrialisasi di Indonesia dalam prespektif ekonomi politik. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(Mei), 68–89.
- Diana, S. R., Ekonomi, F., Agustus, U., Ekonomi, F., & Agustus, U. (2024). Strategi industrialisasi: Analisis struktur industri unggulan pada pembangunan negara. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 2(3).
- Elis. (2013). Dampak industrialisasi terhadap perubahan pola interaksi sosial masyarakat sekitar: Studi kasus di Kampung Babakan Lapang Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk. Retrieved from <https://digilib.uinsgd.ac.id/422/>
- Rahayuningsih, Y. (2017). Dampak sosial keberadaan industri terhadap masyarakat sekitar kawasan industri Cilegon. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 1(1), 13–26. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v1i1.2>
- Rizky, Lucitania, H., & Chusnul. (2020). Kebijakan industrialisasi Bangladesh dalam menarik investasi asing sebagai dampak kebijakan neoliberalisme. *Jurnal Transborder*, 3(2), 60–72.
- Susanto, E. H. (2016). *Pesan, komunikasi politik khalayak, kepemimpinan*. September 2013.
- Tumengkol, S. (2012). *Teori sosiologi suatu perspektif tentang teori konflik dalam masyarakat industri*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Zulkarnaen, A. H. (2018). Masalah rawan dalam hubungan industrial dan konsep negara kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 806. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.32>